

Profile Program **COREMAP-CTI** Papua Barat & Nusa Tenggara Timur

**Melestarikan Terumbu Karang untuk
Kesejahteraan Masyarakat**

**Mitra
Pelaksana:**



PENDAHULUAN

Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program strategis ini akan menghasilkan model inovasi pembangunan terutama dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan serta mendukung upaya penanganan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2017 dan 2019 dilakukan restrukturisasi COREMAP-CTI yang menghasilkan perubahan pelaksana kegiatan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi pelaksana kegiatan yang bersumber dari dana hibah ***Global Environmental Facility (GEF)*** yang dikelola oleh World Bank. Kegiatan ini dilaksanakan melalui satuan kerja ***Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*** sebagai satu-satunya Lembaga nasional dana perwalian untuk perubahan iklim di Indonesia.

Hasil restrukturisasi juga menambahkan tujuan program untuk kegiatan hibah yaitu peningkatan efektifitas pengelolaan pesisir prioritas dengan target capaian efektifitas pengelolaan Kawasan konservasi mencapai 75% level biru.



SEKILAS COREMAP-CTI

Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia menginisiasi sebuah program pelestarian terumbu karang yang dikenal dengan nama COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program) atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang. COREMAP hadir sebagai respon keprihatinan dunia atas degradasi kualitas wilayah pesisir terutama ekosistem terumbu karang. Program jangka panjang ini bertujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem terkait di Indonesia yang pada gilirannya akan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.



Pada tahun 2017 dan 2019 pemerintah Indonesia menyampaikan permintaan formal untuk melakukan restrukturisasi proyek COREMAP-CTI. Restrukturisasi program ditujukan untuk lebih menitikberatkan penguatan terhadap kapasitas kelembagaan pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir untuk menghasilkan informasi berbasis bukti, sebagai respon peningkatan kebutuhan riset.

Sebagai kelanjutannya, LIPI ditunjuk sebagai lembaga pelaksana, peran yang sebelumnya dipegang oleh KKP. Hasil restrukturisasi ini salah satunya adalah mengamanatkan Bappenas melalui ICCTF untuk melaksanakan kegiatan yang didanai oleh hibah Global Environment Facility yang dikelola oleh World Bank dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan ekosistem prioritas melalui pendekatan strategis.

Implementasi kegiatan COREMAP-CTI yang dilakukan oleh ICCTF-Bappenas sejalan dengan fungsi Bappenas sebagai *enabler* dalam pengembangan kawasan perairan secara terpadu untuk menghasilkan model inovasi pembangun pesisir yang dapat direplikasi oleh daerah lain.



Piaynemo Geosite, Raja Ampat, Papua Barat



Suaka Alam Perarian Gili Balu, Nusa Tenggara Barat

Wilayah lokasi kegiatan COREMAP-CTI di Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat adalah:

- Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur
- Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat
- Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah barat, Papua Barat
- Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat, Papua Barat

Komponen Kegiatan COREMAP-CTI dan Sub Komponennya



Secara keseluruhan ada 6 paket kegiatan untuk mendukung tercapainya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan tersebut di atas.

Paket Kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP-CTI)

Dana Hibah Bank Dunia



Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) oleh Masyarakat secara Berkelanjutan di Raja Ampat

Mitra Pelaksana: Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi)



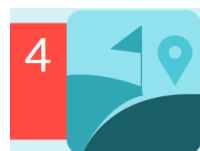
Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) oleh Masyarakat secara Berkelanjutan di Laut Sawu

Mitra Pelaksana: Perkumpulan Pemberdaya Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA)



Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)/National Plan of Action (NPOA) Jenis Terancam di Raja Ampat dan Laut Sawu

Mitra Pelaksana: Reef Check Indonesia



Dukungan Implementasi terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu / *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* di Raja Ampat

Mitra Pelaksana: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB)



Dukungan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas di Raja Ampat dan Laut Sawu

Mitra Pelaksana: Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi)



Akses Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Masyarakat Setempat di Raja Ampat dan Laut Sawu

Mitra Pelaksana: Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)



Judul Kegiatan

Pemanfaatan KKP oleh masyarakat secara berkelanjutan di Raja Ampat



Lokasi

Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Suaka Alam Perairan (SAP) Waigeo Sebelah Barat

Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Selat Dampier



Tujuan

Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Melalui Ekowisata Bahari & Perikanan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

Latar Belakang

Masyarakat setempat selaku pemanfaat sumberdaya dalam kawasan konservasi dihadapkan pada pilihan antara konservasi dengan ekonomi.

Di satu sisi, kawasan konservasi tidak hanya memerlukan dukungan masyarakat lokal, namun membutuhkan dana dalam pengelolaan.

Pengembangan Ekowisata dapat menjadi solusi dengan memberikan insentif dalam bentuk mata pencaharian bagi masyarakat serta perlindungan konservasi bagi lingkungan.



Pemantauan Ekosistem Mangrove



Peningkatan kapasitas masyarakat



Fokus Kegiatan

1. Peningkatan kapasitas masyarakat sebagai modal dasar pengelolaan kawasan konservasi:
 - Rehabilitasi ekosistem pesisir
 - Pemantauan/monitoring ekosistem pesisir
 - Pengelolaan Kawasan konservasi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
 - Kelompok kerja Kawasan konservasi Laut
2. Penyediaan infrastruktur skala kecil yang berwawasan lingkungan seperti stasiun pemantauan pari manta di SAP Raja Ampat, jalur Pendakian di SAP Waigeo Sebelah Barat, Jeti Apung di SAP Waigeo Sebelah Barat, Pusat Informasi dan Infrastruktur ekowisata di SAP Raja Ampat dan Waigeo Sebelah Barat
3. Pengembangan mata pencaharian dan ekonomi berbasis masyarakat

Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA)



Judul Kegiatan

Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) oleh Masyarakat Secara Berkelanjutan di Laut Sawu



Lokasi

Taman Nasional Perairan Laut Sawu



Tujuan

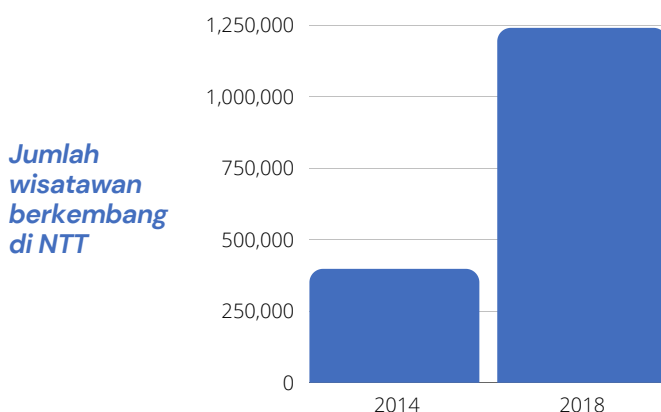
Meningkatnya efektivitas pengelolaan yang menjamin pemanfaatan berkelanjutan di Kawasan Konservasi Perairan Laut Sawu dan sekitarnya

Latar Belakang

Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu terkenal dengan keanekaragaman hayati laut yang melimpah, diantaranya Cetacean (paus, lumba-lumba) serta Sirenian (Dugong) serta ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, serta terumbu karang.

Perkembangan wisata di NTT termasuk di wilayah TNP Laut Sawu & sekitarnya cukup pesat beberapa tahun belakangan ini. Untuk itu, diperlukan Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di TNP Laut Sawu dan sekitarnya.

Proyek ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi baik secara langsung dan tak langsung bagi 137.362 orang atau 30.599 kepala keluarga di 4 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT).



Pertemuan dengan masyarakat Dusun Nusa Manuk di Gereja Nusa Manuk, Desa Fuafuni, Kec. Rote Barat Daya



Fokus Kegiatan

1. Dukungan Infrastruktur pemanfaatan berkelanjutan TNP Laut Sawu yang dimanfaatkan oleh pemangku kawasan dan masyarakat seperti Pusat Informasi Wisata dan Menara Pantau Cetacea
2. Peningkatan kapasitas pemangku kawasan, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola ekowisata dan pemanfaatan berkelanjutan di TNP Laut Sawu.
3. Pengembangan Ekowisata dan Perikanan di TNP Laut Sawu.
4. Pengintegrasian Kebijakan tata kelola dan pemanfaatan TNP Laut Sawu secara berkelanjutan.
5. Pengelolaan KKP Laut Sawu Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K) pada tingkat Biru



Koordinasi dengan Kepala Dinas Disparekraf, Nusa Tenggara Timur



Judul Kegiatan

Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)/National Plan of Action (NPOA) Jenis Terancam di Raja Ampat dan Laut Sawu



Lokasi

Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Suaka Alam Perairan (SAP) Waigeo Sebelah Barat

Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Selat Dampier

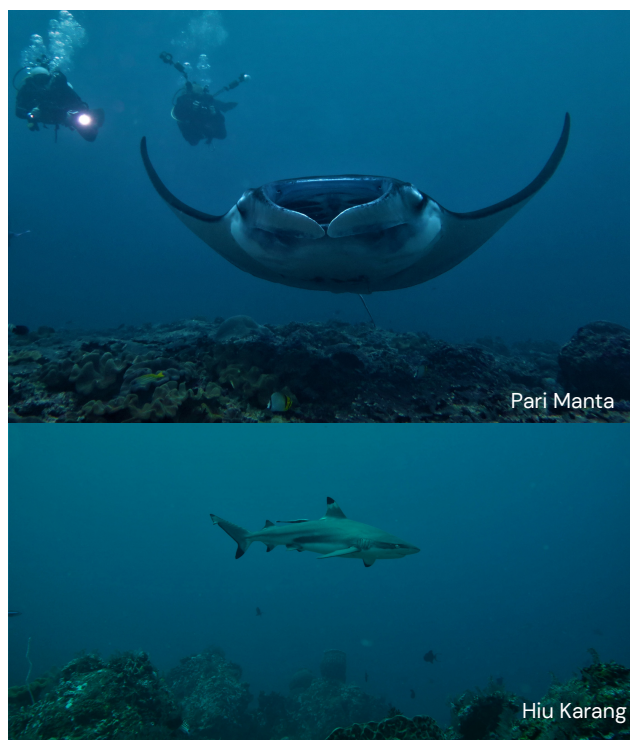


Tujuan

Meningkatkan efektivitas konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan hiu, pari dan Cetacea melalui penerapan kebijakan berbasis sains dan peran aktif masyarakat

Latar Belakang

- Hiu Karang, Pari Manta, dan Cetacea sedang mengalami tekanan dari aktifitas perikanan, yang berdampak pada penurunan populasi.
- Dampak aktifitas perikanan terhadap spesies tersebut di Raja Ampat belum diketahui dengan baik.
- Perlu dilakukan kajian dalam **mendukung Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi dan mendukung pariwisata Raja Ampat** yang berkelanjutan.



Fokus Kegiatan

Rangkaian kajian dan penyusunan panduan laku wisata untuk memperkuat kebijakan nasional tentang hiu, pari dan cetacea

- Dampak Aktifitas Perikanan terhadap Hiu Karang, Pari Manta, dan Cetacea
- Pengembangan system monitoring dan evaluasi
- Populasi dan Pola Pergerakan Hiu Karang dan Pari Manta
- Mitigasi dan Penanganan Cetacea Terdampar

Peningkatan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hiu, pari manta dan cetacea

- Peningkatan pemahaman tentang pengelolaan dan regulasi jenis terancam
- Penanganan kejadian terdampar
- Panduan laku kegiatan pemanfaatan jenis terancam

Pengembangan bisnis wisata species berbasis masyarakat yang berkelanjutan





Judul Kegiatan

Dukungan Implementasi terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu / Integrated Coastal Zone Management (ICZM) di Raja Ampat



Lokasi

Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Raja Ampat

Kawasan Konservasi Perairan (Nasional & daerah)

- Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat (Nasional)
- SAP Waigeo Sebelah Barat (Nasional)
- Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Selat Dampier.



Tujuan

Mendukung percepatan pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Papua Barat dan KKP/KKPD di Provinsi Papua Barat, pada khususnya Kabupaten Raja Ampat.

Latar Belakang

Indonesia sedang menggalakkan pembangunan di wilayah pesisir dan laut di berbagai sektor. Perencanaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wujud Rencana Zonasi Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan komponen utama yang harus disiapkan. Namun, dalam implementasi RZWP-3-K potensial terjadi tumpang tindih antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi. Dengan RZWP-3-K diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir dan laut, serta menjamin kepastian hukum dalam investasi. Untuk itu, dibutuhkan instrumen yang tepat dalam implementasinya berupa protokol RZWP-3-K beserta instrumen pemantauannya yang dikemas dalam kerangka *Integrated Coastal Management* (ICM).



Coaching clinic survei Knowledge, Attitude, & Practices

Wawancara KAP dengan masyarakat & dinas di Kab. Raja Ampat



Peliputan & pemantauan di Pelabuhan Perikanan Sorong



Fokus Kegiatan

1. Membangun platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu/Integrated Coastal Zone Management (ICZM)
2. Menyusun Rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)
3. Menyusun Rencana teknis dan SOP pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung.
4. Menyusun Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K yang dibangun dan diimplementasikan.
5. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi
6. Rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan/atau terumbu karang).
7. Penyadartahuan masyarakat melalui kampanye dan publikasi hasil-hasil program.



Peliputan dan pemantauan di Teluk Mayalibit, Raja Ampat



Judul Kegiatan

Dukungan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas di Raja Ampat dan Laut Sawu



Lokasi

Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Suaka Alam Perairan (SAP) Waigeo Sebelah Barat

Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Selat Dampier



Tujuan

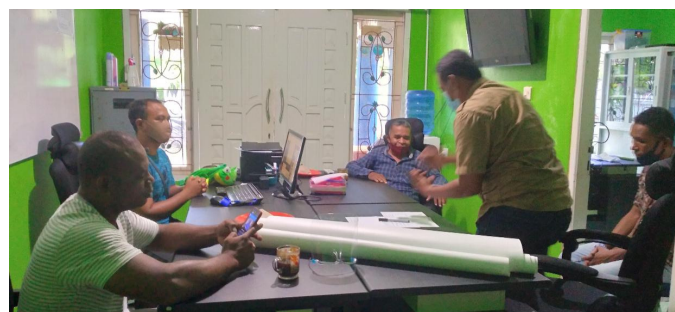
Penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam pengawasan kawasan konservasi

Latar Belakang

Tidak adanya kelembagaan pokmaswas yang kuat secara legal akan mempengaruhi efektivitas pengawasan kawasan konservasi berbasis masyarakat.

Selain itu kurangnya kapasitas anggota pokmaswas dalam hal pengawasan, pemantauan dan pengelolaan

Kawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas pengawasan seperti kapal pengawasan dan alat-alat penunjang pengawasan akan mengakibatkan kegiatan pengawasan Kawasan tidak dapat berjalan dengan baik.



Koordinasi dengan BLUD Raja Ampat



Persiapan koordinasi dan survey lokasi pokmaswas dan menara pengawasan di Meosmanggara



Fokus Kegiatan

1. Mendorong tersedianya kelembagaan yang legal serta area kerja yang jelas bagi POKMASWAS misalnya memfasilitasi pertemuan forum pokmaswas di Raja Ampat dan Laut Sawu serta pemetaan partisipatif area kerja POKMASWAS.
2. Peningkatan kapasitas dalam bidang ekologi maupun bisnis untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam melakukan pengawasan.
3. Penyediaan infrastruktur skala kecil serta dukungan beberapa peralatan akan membantu pokmaswas lebih efektif dalam melakukan pengawasan misalnya Menara pengawas di Raja Ampat dan Laut Sawu, bantuan operasional pengawasan bagi POKMASWAS.
4. Penyusunan strategi nasional pengawasan berbasis masyarakat dengan mengadakan.
5. Seminar Nasional strategi pengawasan berbasis masyarakat.



Judul Kegiatan

Akses Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Masyarakat Setempat di Raja Ampat dan Laut Sawu



Lokasi

Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur

Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat



Tujuan

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kemitraan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Pembelajaran Terbaik Kelola Adat dalam Penerapan *Right Based Fisheries Management* (RBFM)

Latar Belakang

Sebagian besar penduduk di kampung-kampung Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat bermatapencaharian sebagai nelayan.

Kegiatan ini memperkuat penerapan konsep “wilayah penangkapan ikan” kelompok masyarakat (khususnya kesatuan masyarakat hukum adat / KMHA) di Papua Barat dengan Distrik Waigeo Barat bagi pengembangan kemitraan konservasi SAP Kepulauan Raja Ampat (SAP-KRA).

Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur (percontohan Kabupaten Rote Ndao).



Pelibatan masyarakat dalam kajian pemetaan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan



Pelatihan Kajian Pemetaan Partisipatif



Fokus Kegiatan

Menguatnya kelembagaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan di TNP Laut Sawu (TNP-LS) dan SAP Kepulauan Raja Ampat (SAP-KRA)

- pengakuan dan perlindungan *tenurial system* KMHA;
- kajian *baseline* RBFM dan kajian dampak sosial ekonominya

Berkembangnya praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal oleh kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA)

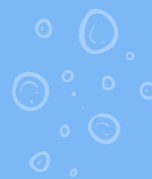
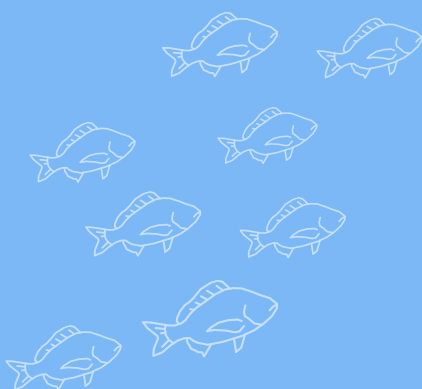
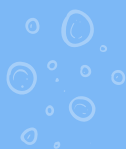
- rencana pengelolaan *input, output* dan *process control*;
- rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (*Right based sustainable fisheries management* atau RB-SFM);

Implementasi rencana pengelolaan RB-SFM oleh KMHA dampingan

- Sarana pendukung pengelolaan
- Sarana pendukung pengembangan usaha
- Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dan pengembangan usaha



Indonesia Climate Change Trust Fund
Lippo Kuningan 15th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta
(021) 80679386
secretariat@icctf.or.id
www.icctf.or.id



**SUPPORTING
THE INDONESIAN
GOVERNMENT
FOR A BETTER
CLIMATE**